



# Kemitraan pemerintah kelurahan dalam penanganan COVID 19 dengan model pentahelix di Kota Malang (Studi pada Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang)

Vira Annisa Utami Nasution\*, Krishno Hadi, Ali Roziqin

Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Penulis korespondensi, Surel: vira.annisa.un@gmail.com

Paper received: 15-02-2022; revised: 20-02-2022; accepted: 25-02-2022

## Abstract

The growth of new cases of COVID 19 in Malang City is increasing every day. Serious steps are needed to deal with this problem. The government has implemented a quarantine law as a form of handling COVID 19, starting from PSBB to PPKM mikro at the village level. The concept pentahelix as a perspective used in dealing with COVID 19 involving actors, including the government, academia, the community, business actors, and the media. The focus of this research is to look at the process of cooperation in the form of a partnership pattern in handling COVID 19, and obstacles in the implementation of the cooperation process. The initiation of cooperation in handling COVID 19 was carried out by the Purwodadi Village Government, which is also a facilitator and policy maker. The steps taken in determining the work program consist of coordination, synchronization, and implementation of cooperation. The coordination process was carried out online and offline and resulted in an agreement. In the implementation of cooperative activities, all actors pentahelix are not always involved. The process of monitoring cooperation is carried out in stages, starting from the lowest administrative unit (RT). The result of this collaboration is the creation of a green zone area in Purwodadi Village with a total of 0 cases. The obstacles experienced in the form of limited human resources and the role of the media are considered not to have moved optimally.

**Keywords:** pentahelix; COVID 19 handling; pandemic

## Abstrak

Pertumbuhan kasus baru COVID 19 di Kota Malang setiap hari semakin meningkat. Diperlukan langkah serius dalam menghadapi permasalahan tersebut. Pemerintah telah menerapkan undang-undang kekarantinaan sebagai bentuk penanganan COVID 19, dimulai dari PSBB hingga PPKM Mikro tingkat kelurahan. Konsep pentahelix sebagai suatu perspektif yang digunakan dalam menangani COVID 19 yang melibatkan aktor-aktor, antara lain pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat, pelaku usaha, dan media. Fokus penelitian ini yaitu untuk melihat proses kerja sama dalam bentuk pola kemitraan dalam penanganan COVID 19, dan hambatan dalam pelaksanaan proses kerja sama. Inisiasi kerja sama penanganan COVID 19 dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Purwodadi yang juga menjadi fasilitator dan pembuat kebijakan. Langkah yang ditempuh dalam penetapan program kerja terdiri dari koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kerja sama. Proses koordinasi dilakukan secara daring dan luring dan menghasilkan kesepakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, seluruh aktor pentahelix tidak selalu terlibat. Proses monitoring kerja sama dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat terbawah yaitu RT. Hasil dari kerja sama ini yaitu terciptanya kawasan zona hijau di Kelurahan Purwodadi dengan jumlah 0 kasus. Hambatan yang dialami berupa terbatasnya SDM dan peran media dinilai belum bergerak secara maksimal.

**Kata kunci:** pentahelix; penanganan COVID 19; pandemi

## 1. Pendahuluan

Pada awal Januari 2021 lalu tercatat bahwa kasus positif COVID 19 di Indonesia mencapai angka satu juta kasus (covid.go.id, 2021). Di Kota Malang sendiri, hingga akhir Desember 2020 kasus positif COVID 19 yang terkonfirmasi sebanyak 3.699 jiwa. Dalam

perkembangan kasusnya, grafik persebaran COVID 19 di Kota Malang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mulai dari suspek, pasien positif, pasien sembuh, dan juga pasien meninggal. Kenaikan jumlah kasus baru di Kota Malang dapat terbilang cukup tinggi, terutama di bulan Juli hingga Desember 2020.

**Table 1. Data Persebaran COVID 19 di Kec. Blimbing**

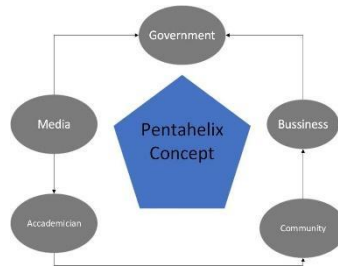
	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Suspect	42	132	242	269	353	412	489	630	772	955
Positif	1	3	20	70	177	318	447	508	575	896
Sembuh	1	3	5	18	115	222	386	46	517	729
Meninggal	0	0	2	5	12	20	42	48	58	84

Sumber: <https://malangkota.go.id/tag/covid19/>

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Blimbing Kota Malang mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun pasien suspek dan positif meningkat, pasien yang sembuh juga sama banyaknya. Namun seiring berjalannya waktu, Kecamatan Blimbing mampu menekan laju percepatan kasus baru COVID 19.

Manajemen penanganan COVID 19 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Hal ini merupakan implementasi dari definisi bencana yang diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, dan penanganan COVID 19 diperkuat dengan UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Putra et al., 2020). Pemerintah Pusat telah membuat kebijakan-kebijakan dalam menangani persebaran kasus COVID 19 di Indonesia. Beberapa kebijakan tentunya mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam pengimplementasiannya, namun beberapa kebijakan yang telah dibuat dinilai tidak efektif dalam penerapannya (Rahmawati et al., 2021). Hal ini dibuktikan dengan tidak terjadi penurunan kasus COVID 19, justru daerah persebarannya semakin meluas. Karena kebijakan yang dibuat pemerintah bersifat *top-down* yang menargetkan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakannya. Tidak semua masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut, yang kemudian disimpulkan bahwa penanganan COVID 19 di Indonesia dinilai berhasil jika masyarakat mematuhi dan menerima kebijakan yang telah dibuat (Roziqin et al., 2021).

Aktor pada konsep *Quintuple Helix* terdiri dari akademisi perguruan tinggi, industri, pemerintah, media dan publik, dan sumber daya alam (Carayannis & Campbell, 2010). Calzada (2016) menambahkan *Non-Government Organization* (NGO) sebagai helix ke-lima. Dengan demikian, konsep *pentahelix* menurut Calzada merupakan pola kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan banyak aktor yang terdiri dari akademisi, pelaku bisnis, komunitas masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah (Calzada, 2016). Selanjutnya konsep *Pentahelix* ini dibahas lebih lanjut yang menghasilkan lima komponen dalam *Pentahelix* yang terdiri dari akademisi yang memberikan inovasi melalui ilmu pengetahuan mutakhir, pemerintah sebagai fasilitator dalam pengimplementasian kegiatan, swasta sebagai pelaku usaha yang memberikan dukungan dalam bentuk peminjaman modal dan komersialisasi produk, lembaga swadaya masyarakat dan juga komunitas masyarakat sipil yang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan sosial dan ekonomi (Halibas et al., 2017).



**Gambar 1. Konsep Pentahelix**

Konsep *Pentahelix* di Indonesia pada awalnya digunakan sebagai salah satu model dalam mengembangkan pariwisata. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016. Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa konsep *Pentahelix* yang diterapkan di Indonesia menggunakan lima pemangku kepentingan dalam kegiatan kolaborasi yang terdiri dari akademisi di tingkat perguruan tinggi, pelaku usaha dan bisnis, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media (Sudiana et al., 2020). Seiring berjalannya waktu, konsep ini tidak hanya digunakan dalam mengatasi masalah di bidang pariwisata saja. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif implementasi kemitraan dengan pendekatan pentahelix untuk penanganan COVID 19 di tingkat kelurahan.

## 2. Metode

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell et al., 2007). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa wawancara dengan Lurah Purwodadi dan akademisi UIN Malang, serta didukung dengan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan *website* yang membahas tentang penanganan COVID 19 dengan model *pentahelix*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data awal, wawancara, analisis, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kasus terkonfirmasi positif COVID 19 pertama di Kota Malang diumumkan pada bulan Maret 2020 dan sejak saat itu perkembangan kasus COVID 19 di Kota Malang mengalami kenaikan kasus setiap harinya. Kondisi tersebut yang memutuskan Pemerintah Kota Malang bergerak untuk menangani kondisi tersebut secara fokus pada bulan April 2020. Di saat yang sama, Kelurahan Purwodadi belum menemukan kasus positif COVID 19 di wilayahnya. Seiring berjalannya waktu, karena minimnya pengetahuan akan kondisi yang tengah terjadi, masyarakat di Kelurahan Purwodadi mulai terinfeksi. Hingga pada bulan April 2021, akumulasi kasus terkonfirmasi positif COVID 19 di Kelurahan Purwodadi mencapai 115 kasus. Namun dari total akumulasi kasus tersebut, mayoritas pasien dinyatakan sembuh. Hanya terdapat lima belas (15) orang yang meninggal.

Kerja sama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, akademisi, dan media ini memiliki tujuan yang sama, yaitu agar pandemi COVID 19 segera menurun. Penanganan COVID 19 melibatkan pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media dengan menempatkan berdasarkan kemampuannya. Penanganan COVID 19 dengan model *pentahelix* ini diindikasikan mampu dalam menekan persebaran virus COVID 19, dalam hal ini

Kelurahan Purwodadi berupaya untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

### 3.1. Penetapan Program Kerja COVID 19

Dalam penetapan program kerja penanganan COVID 19 di lingkungan Kelurahan Purwodadi, diperlukan langkah proaktif yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Langkah proaktif tersebut meliputi prosedur dalam mencapai kesepakatan untuk menguatkan kapasitas kolaborasi dalam penanganan COVID 19. Prosedur kesepakatan yang dibuat harus berdasarkan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan COVID 19 yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Ketika prosedur kesepakatan telah dilaksanakan, maka kemudian menghasilkan program kerja yang telah ditetapkan. Dalam pengimplementasiannya, banyak yang berpendapat bahwa kerja sama harus dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor yang terlibat. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Emerson dan Nabatchi yang berpendapat bahwa kerja dapat dilakukan secara individual, maupun hanya melibatkan beberapa pihak yang memiliki andil di dalamnya (Emerson et al., 2012). Program kerja yang telah ditetapkan yaitu program 3T, yang terdiri dari *Tracing, Testing, dan Treatment*, Kampung Mandiri, dan pemberian bantuan logistik.

Untuk memperkuat komitmen antar aktor, diperlukan suatu payung hukum yang mengikat. Hal ini sejalan dengan desain institusional yang di dalamnya berisi forum, partisipasi, dan memiliki *legal basic* yang jelas (Ansell & Gash, 2007). Penanganan COVID 19 di Kelurahan Purwodadi menggunakan Instruksi Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### 3.2. Pelaksanaan Kerja Sama *Pentahelix*

Langkah-langkah yang ditempuh aktor-aktor yang terlibat dalam melaksanakan kerja sama yaitu melakukan koordinasi melalui dialog tatap muka meskipun terbatas. Setelah dialog tatap muka dilaksanakan secara rutin dan berkala, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah mensinkronisasikan aktor-aktor yang terkait. Ketika semua elemen telah sinkron, maka selanjutnya kerja sama akan dapat dijalankan dengan arahan serta tugas pokok dan fungsi yang jelas.

Kelurahan Purwodadi sebagai *leading sector* dalam penanganan COVID 19 berupaya untuk dapat membangun suatu garis komunikasi yang sinkron agar kerja sama tersebut mampu dijalankan dengan baik. Cara yang ditempuh yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi. Pertemuan tersebut menghadirkan semua *stakeholder* yang terlibat. Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsolidasi tersebut tidak selalu terjadwal dan tidak menerapkan pertemuan formal namun tetap mengedepankan maksud dan tujuan dari kesepakatan yang telah disetujui. Di masa pandemi COVID 19 yang tengah berlangsung, pemerintah kelurahan mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi melalui dua cara, yaitu menggunakan daring dan luring.

Seluruh aktor telah sepakat dan saling percaya, komitmen yang dihasilkan dari kepercayaan tersebut yaitu aktor yang terlibat peduli akan kondisi yang tengah terjadi. Kemudian muncul peran serta para aktor *pentahelix* dalam menangani COVID 19 dengan dilakukannya rapat koordinasi yang sebelumnya telah dilaksanakan. Dan komitmen yang telah

disepakati yaitu: a.) *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan COVID 19 di lingkungan Kelurahan Purwodadi sepakat bahwa virus COVID 19 merupakan ancaman serius dan keberadaannya nyata dan berbahaya; b.) dalam penanganan COVID 19 diperlukan perhatian khusus karena keberadaannya yang berbahaya tidak dapat disepelekan penanganannya; c.) *stakeholder* yang terlibat harus melakukan langkah proaktif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini merupakan kunci dalam menghadapi pandemi COVID 19 yang tengah terjadi untuk menekan laju pertumbuhan kasus baru.

Kegiatan kerja sama *pentahelix* dalam penanganan COVID 19 merupakan hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi dalam bentuk luaran yang nyata. Konsep *pentahelix* dalam penanganan COVID 19 di Kelurahan Purwodadi telah mencapai kesepakatan bersama dalam menetapkan program kerja yang akan dijalani. Meskipun program kegiatan yang telah disetujui tidak menghadirkan seluruh aktor yang terkait, namun hal ini masih dapat dikatakan sebagai kerja sama antar sektor. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Nabatchi dan Emerson yang mengatakan bahwa kegiatan kerja sama dapat dilakukan baik secara individual maupun hanya melibatkan beberapa aktor saja, namun tetap berprinsip pada pengetahuan dan kapasitas masing-masing aktor (Emerson et al., 2012).

### 3.3. Monitoring dan Evaluasi Penanganan COVID 19

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan agar kegiatan tersebut benar-benar terlaksana. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh seluruh aktor *pentahelix* yang terlibat. Pada penanganan COVID 19 di lingkungan Kelurahan Purwodadi, proses *monitoring* diadakan berkala setiap minggunya. Seluruh kegiatan penanganan COVID 19 yang dilakukan oleh aktor *pentahelix* yang terlibat didampingi oleh pihak medis dengan mencatat dan mengevaluasi setiap ditemukannya kasus baru maupun korban meninggal. Proses *monitoring* yang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat terbawah, yaitu RT, kemudian RW hingga kelurahan. Fungsi dari kegiatan *monitoring* dan evaluasi ini yaitu untuk menstabilkan lingkungan yang berada di zona hijau untuk tetap siaga dengan 0 kasus baru setiap saat. Selain sektor pemerintah, peran media juga diperlukan dalam memonitoring dan mengevaluasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

### 3.4. Hasil Penanganan COVID 19

Hasil dari kerja sama yang efisien dalam hal penanganan COVID 19 di lingkungan Kelurahan Purwodadi yaitu terwujudnya harapan yang ingin dicapai. Hasil dari kerja sama ini yaitu saling percaya, komunikasi yang dibangun dengan masyarakat, keputusan yang disepakati dari adanya kerja sama, dan bentuk nyata dari kegiatan kerja sama yang telah disepakati. Namun, Emerson dan Nabatchi memiliki perspektif yang berbeda, mereka mendefinisikan hasil kerja sama sebagai acuan transformasi fisik, ekologi, sosial, ekonomi dan politik atau perubahan kualitatif dan juga kuantitatif. Booher (1999) memberikan penjelasan bahwa hasil dari proses kerja sama ini merupakan efek yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak yang terlihat dan dampak yang tidak terlihat (Emerson et al., 2012). Secara langsung, efek dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam penanganan COVID 19 ini yaitu mewujudkan wilayah Kelurahan Purwodadi berstatus zona hijau, yaitu wilayah dengan total 0 kasus baru setiap harinya.

**Tabel 2. Tren Penurunan Kasus COVID 19 Saat Penanganan**

	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Kasus	15	16	20	24	13	14	10	3	0
Total Akumulasi: 115 Kasus									

Tren di atas merupakan hasil dari penanganan COVID 19 dengan model *pentahelix* di Kelurahan Purwodadi. Data di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus yang diakibatkan dari kegiatan *tracing*, meskipun kondisi yang terjadi sedang tidak stabil. Terdapat kenaikan kasus yang cukup signifikan, terutama di bulan Desember 2020 hingga Januari 2021. Pada bulan September hingga Desember 2020, terjadi peningkatan kasus dikarenakan perkembangan kasus COVID 19 di Kota Malang sedang tinggi-tingginya. Namun seiring berjalannya waktu, Kelurahan Purwodadi mampu menekan laju pertambahan kasus baru karena kerja sama yang melibatkan sektor-sektor esensial. Penanganan COVID 19 yang dilakukan para aktor *pentahelix* yaitu dengan pelacakan suspek dengan alat deteksi dini, seperti *Rapid Test Antigen* dan PCR. Selanjutnya menyediakan alat sanitasi portabel, seperti penyediaan wastafel, pengadaan bilik antivirus, yang merupakan bentuk kerja sama aktor dalam penanganan COVID 19 di lingkungan Kelurahan Purwodadi. Hasilnya, terjadi penurunan kasus dan pada bulan Mei 2021, Kelurahan Purwodadi belum memiliki kasus baru di wilayahnya.

Meskipun koordinasi, komunikasi dan kerja sama dilaksanakan dengan cukup baik, tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan dalam penanganan COVID 19 di Kelurahan Purwodadi. Aktor-aktor yang terlibat telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang terjadi berupa keterbatasan sumber daya manusia dalam penanganan COVID 19 di Kelurahan Purwodadi. Penanganan COVID 19 harus selalu cepat tanggap dalam pengeksekusiannya. Namun jumlah sumber daya manusia terbatas. Kurangnya sumber daya manusia juga berakibat pada manajemen waktu. Dalam penanganan COVID 19 memerlukan tindakan sesegera mungkin. namun SDM tidak terpenuhi, akibatnya pasien lebih lama untuk mendapatkan pertolongan. Meskipun begitu, Pemerintah Kelurahan Purwodadi telah berupaya untuk menambah personel untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Hambatan lainnya yaitu peran media tidak bergerak secara maksimal. Peran pers yang terlihat hanya pada saat meliput kegiatan yang melibatkan penanganan COVID 19 sedang dilakukan. Peran media juga hanya sebagai wadah untuk mencegah *hoax* tentang COVID 19 agar berita bohong tersebut tidak sampai ke masyarakat. Peran media sebagai salah satu unsur *pentahelix* tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk *website* internal Kelurahan Purwodadi juga sudah lama tidak mengalami pembaharuan. Fenomena tersebut menjelaskan hambatan yang meliputi peran media sebagai unsur *pentahelix* dalam penanganan COVID 19 di Kelurahan Purwodadi.

#### 4. Simpulan

Penanganan COVID 19 memerlukan sinergitas antara seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu, konsep *pentahelix* ini diindikasikan mampu untuk menangani COVID 19 dalam hal menekan laju pertambahan kasus baru COVID 19 di lingkungan Kelurahan Purwodadi. Aktor-aktor *pentahelix* yang terlibat telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kerja sama antara pemerintah kelurahan dengan akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media telah berjalan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu penurunan kasus baru COVID 19 di lingkungan Kelurahan Purwodadi. Dalam

proses kerja sama *pentahelix*, peran serta dari aktor-aktor yang terlibat dinilai efektif dalam hal penurunan kasus baru COVID 19. Hal ini memberikan dampak bagi masyarakat dan juga lingkungannya. Penelitian ini berfokus pada penanganan COVID 19 di Kelurahan Purwodadi secara umum dengan sudut pandang medis dan melibatkan banyak sektor. Kerja sama yang melibatkan banyak sektor mengalami dinamika yang terjadi di lapangan.

### Daftar Rujukan

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Calzada, I. (2016). *(Un) Plugging Smart Cities with urban transformations: Towards multi-stakeholder city-regional complex urbanity?*
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple Helix, Quadruple Helix, and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation, and The Environment Relate to Each Other? a Proposed Framework for Trans-Disciplinary Analysis of Sustainable Development and Social Ecology. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1, 41-69.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Administration Research and Theory*, 22, 1-29.
- Halibas, A., Sibayan, R., & Maata, R. L. (2017). The Pentahelix Model of Innovation in Oman: An Hei Perspective. *Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12.
- Putra, D. I., Sofyan, S., Bimo, & ZA, S. (2020). *Pedoman Manajemen Bagi Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID 19 dan Dampaknya*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Rahmawati, Y., Santaufany, F. F. A., Hati, E. M., & Roziqin, A. (2021). Kearifan lokal dalam menghadapi COVID 19: Studi kampung tangguh di Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(1), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.936>
- Roziqin, A., Mas'udi, S. Y. F., & Sihidi, I. T. (2021). An analysis of Indonesian Government Policies Against COVID 19. *Public Administration and Policy*, 24, 92-107.
- Sudiana, K., Sule, E. T., Tisnawati, E., Soemaryani, I., & Yunizar, Y. (2020). The Development and Validation of the Pentahelix Construct. *Business: Theory and Practice*, 21, 136-145.